

ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
PARIWISATA BERKELANJUTAN SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI
DAERAH DI KABUPATEN BULUNGAN

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun Oleh:

Saripa (202242002)



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KALTARA
2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/ segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja. Dikenal dengan istilah pariwisata untuk semua kegiatan yang dilakukan manusia ketika mereka melakukan perjalanan dan tinggal terus

menerus untuk jangka waktu kurang dari satu tahun di luar lingkungan biasa mereka dengan tujuan utama liburan dan liburan. (Saragih, M. G., & SE, M. (2022).

Indonesia dengan kekayaan budaya, alam, dan warisan sejarahnya merupakan salah satu tujuan wisata populer di dunia. Selain destinasi wisata yang telah berkembang, pemerintah juga mendorong pengembangan desa wisata di berbagai wilayah Indonesia. Desa wisata menjadi bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, melestarikan budaya dan lingkungan, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, pengembangan desa wisata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, sehingga memerlukan upaya yang berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Utara merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 dengan pusat pemerintahan berada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Sektor ekonomi utama di Kabupaten Bulungan meliputi perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Namun demikian, sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan masih belum berkembang secara optimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya potensi wisata desa yang belum tereksplorasi, rendahnya

kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Kabupaten Bulungan terdiri atas 10 kecamatan, 7 kelurahan, dan 74 desa. Pemerintah daerah telah menetapkan enam desa wisata sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, pemerintah memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pemberian motivasi, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, serta pemberian kesempatan kepada masyarakat agar mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Masyarakat yang berdaya diharapkan mampu mengelola potensi daerah secara mandiri dengan tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Peningkatan pariwisata membutuhkan dukungan masyarakat yang berdaya serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. (Yunus, J. A. Y. W. (2003).

Kabupaten Bulungan memiliki beragam potensi wisata alam, antara lain Air Terjun KM 18 di Kecamatan Tanjung Selor yang terletak di Desa Jelarai dengan ketinggian sekitar 15 meter dan dikelilingi hutan alami. Selain itu, terdapat Sumber Air Panas Sajau di Kecamatan Tanjung Palas Timur yang menjadi daya tarik wisata berupa pemandian air panas alami. Pemandian Air Hutan

KM 2 di Kecamatan Tanjung Selor juga menjadi alternatif wisata yang dekat dengan pusat kota dan menawarkan suasana alam yang asri. Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas merupakan destinasi ikonik berupa tebing dan gua kapur putih yang populer untuk pendakian dan fotografi, meskipun masih menghadapi kendala dalam hal perawatan. Salah satu potensi unggulan lainnya adalah kawasan Ekowisata Air Terjun Sungai Sebakut yang terletak di Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas. Kawasan ini terintegrasi dengan perhutanan sosial seluas 46 hektar dan memiliki jarak sekitar 30 kilometer dari Tanjung Selor. Air Terjun Sungai Sebakut dikelola langsung oleh masyarakat setempat dengan konsep ekowisata, yaitu pengembangan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal serta pelestarian lingkungan. Dalam kawasan ekowisata tersebut telah dibangun berbagai fasilitas pendukung, seperti rumah inap berbentuk segitiga, tangga menuju air terjun, anjungan di tepi Sungai Sebakut, serta fasilitas penunjang lainnya. Kawasan ini juga terintegrasi dengan perkebunan coklat yang telah dikelola masyarakat Desa Antutan sejak tahun 2019 dengan jumlah tanaman mencapai sekitar 40.000 pohon. Integrasi antara wisata alam dan aktivitas pertanian diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Air Terjun Sungai Sebakut memiliki ketinggian sekitar 10 meter dengan aliran air yang deras dan lingkungan hutan yang masih alami. Akses menuju lokasi dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, sehingga menjadikannya sebagai alternatif wisata alam selain Air Terjun Karai. Keindahan alam yang masih terjaga menjadikan kawasan ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan di Kabupaten Bulungan.

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi. Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari arah pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia. Dengan kata lain, dalam keadaan nasional itulah terletak landasan bagi kebijakan pengembangan pariwisata. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI menyatakan sebagai visinya bahwa pembangunan kebudayaan bangsa, meningkatkan peradaban dan persatuan bangsa, serta meningkatkan persahabatan antarnegara (Darmatasia et al., 2020). Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan industri pelayanan dan jasa yang menjadi andalan Indonesia dalam rangka meningkatkan devisa negara di sektor non migas. Walaupun penghasilan seringkali dikaitkan dengan jumlah wisatawan mancanegara

karena menghasilkan devisa, namun wisatawan nusantara sangat mempengaruhi kegiatan kepariwisataan, termasuk hotel, restoran maupun industri cinderamata. Pengembangan obyek wisata juga merupakan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik (Darmatasia et al., 2020).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah. Penugasan oleh pemerintah melalui kementerian negara/lembaga merupakan penugasan dalam lingkup kewenangan pemerintah. Pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan didanai oleh pemerintah. Pendanaan oleh pemerintah ini disesuaikan dengan penugasan yang diberikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar besaran dana yang dialokasikan harus menjamin terlaksananya penugasan yang diberikan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik (Darmatasia et al., 2020).

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk

pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksudkan di atas merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dengan dorongan dan perhatian yang besar dari pemerintah diharapkan dapat menjaring wisatawan sebanyak-banyaknya, baik wisatawan dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menyaksikan obyek wisata yang ada di daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia (Darmatasia et al., 2020).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi mengenai beberapa permasalahan terkait pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan, antara lain :

1. Kualitas jalan menuju obyek-obyek wisata di daerah yang jauh dari kota belum memadai.
2. Minimnya sarana akomodasi dan pelayanan kebutuhan wisatawan di obyekobyek wiasata.
3. Pengelolaan obyek wisata yang belum profesional.
4. Minimnya sarana promosi.
5. Rendahnya sadar wisata masyarakat di sekitar obyek wisata.
6. Fasilitas pendukung di obyek-obyek wisata belum tersedia.
7. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pariwisata, hal ini diakui oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu kendala dalam penanganan obyek wisata

seperti Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas (dikutip dari Bulungan Post, 31 Oktober 2016).

Faktor yang mempengaruhi kurang diminatinya obyek wisata di Kabupaten Bulungan ini dikarenakan obyek wisata yang tidak terawat serta lingkungan obyek wisata yang kotor akan sampah-sampah. Bukan hanya itu, sepiunya kunjungan para wisatawan disebabkan kurangnya promosi dan fasilitas pendukung yang juga belum tersedia. Seperti kurangnya fasilitas penginapan, dan restoran, bahkan fasilitas infrastruktur jalan menuju obyek wisata juga kurang memadai. Pengemasan obyek wisata yang ada di Kabupaten Bulungan belum tertata dengan baik, kurang menarik dan pengelolaannya tidak kreatif membuat wisatawan kurang begitu tertarik untuk mengunjungi obyek wisata tersebut. Sarana aksesibilitas untuk menuju obyek wisata kurang tersedia, misalnya angkutan umum yang menuju lokasi obyek wisata dan kondisi jalan menuju obyek wisata masih sempit, kurangnya promosi, pemasaran yang dilakukan masih bersifat lokal, dan belum adanya hubungan kerjasama antar pemerintah.

Pengembangan pariwisata dalam negeri telah diarahkan untuk memupuk cinta tanah air dan bangsa, menanamkan jiwa dan semangat serta nilai-nilai luhur bangsa, meningkatkan kualitas budaya bangsa, memperkenalkan peninggalan sejarah, keindahan alam termasuk bahari dengan terus meningkatkan wisata remaja-

remaja pemuda. Peningkatan kesadaran dan pariwisata masyarakat melalui usaha penyuluhan dan pembinaan kelompok-kelompok seni budaya, industry kerajinan, memperkenalkan dan mengembangkan budaya bangsa, terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata, kebijaksanaan yang digariskan adalah yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora dan fauna hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan model bagi perkembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia. Model ini harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan untuk berbagai tujuan nasional, termasuk untuk masyarakat dan persahabatan antarbangsa. Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup, serta daya tarik wisata itu sendiri. (Kurniawati, R., & MM, M. (2013).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Bulungan dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan

sebagai penggerak ekonomi daerah

2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan
3. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bulungan

1.3 Tujuan Penelitian

penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Bulungan dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan
3. Untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi daerah di Kabupaten Bulungan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

kajian ilmiah mengenai pengembangan pariwisata berkelanjutan serta perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

2. Manfaat Praktis

A Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bulungan

B Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata daerah

C Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan

1.5 Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai isi skripsi, penelitian ini disusun dalam lima bab utama yang saling berkesinambungan, yaitu:

a Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan dasar pelaksanaan penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan. Bagian ini menjadi landasan awal dalam memahami konteks penelitian dan arah pembahasan.

b Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan berbagai landasan teori yang relevan dengan penelitian, seperti konsep pariwisata berkelanjutan, pembangunan ekonomi daerah, strategi pengembangan pariwisata, serta pemanfaatan potensi wisata berbasis kearifan lokal. Selain itu, dipaparkan juga hasil penelitian terdahulu sebagai pembandingan dan dukungan akademik, serta kerangka berpikir yang menjadi dasar analisis penelitian.

c Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan dan prosedur penelitian yang digunakan, mencakup jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, subjek atau informan penelitian, serta teknik analisis data. Bab ini memastikan bahwa

langkah penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

d Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil temuan penelitian mengenai kondisi dan potensi pariwisata di Kabupaten Bulungan, kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi daerah, serta analisis strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Temuan tersebut kemudian dibahas secara mendalam dengan mengaitkannya pada teori dan rujukan ilmiah sehingga menghasilkan interpretasi yang komprehensif dan objektif.

e Bab V Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang diperuntukkan bagi pihak-pihak terkait, terutama pemerintah dan masyarakat, dalam mengoptimalkan pengembangan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah secara berkelanjutan. Bab ini juga dapat memuat keterbatasan penelitian serta rekomendasi bagi penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep pariwisata

Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang semakin relevan dalam pengembangan industri pariwisata di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan social budaya masyarakat setempat, dalam konteks Indonesia, yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Pariwisata berkelanjutan menjadi strategi penting untuk memastikan manfaat jangka Panjang bagi semua pemangku kepentingan. Namun, implementasi konsep ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan ekonomi hingga perubahan perilaku wisatawan. Pemahaman yang komprehensif mengenai perspektif, pendekatan, serta factor

pendorong dan penghambat pariwisata berkelanjutan sangat diperlukan. (Irawati, N. 2025)

Pariwisata berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan sector pariwisata nasional. pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan telah mengarahkan kebijakan pariwisata agar lebih rama lingkungan, berbasis komunitas, dan memperhatikan aspek social budaya. Hal ini sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi, social, dan lingkungan Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa memiliki potensi besar untuk menerapkan prinsip ini secara efektif. Namun, tantangan dalam imflementasi pariwisata berkelanjutan masih cukup kompleks, terutama terkait dengan kesadaran masyarakat dan pelaku industri. Beberapa destinasi wisata populer masih menghadapi permasalahan seperti over-tourism, degradasi lingkungan, dan ketimpangan manfaat ekonomi. Penignkatan regulasi, pengawasan, serta edukasi kepada wisatawan dan pelaku industri menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi ini (Prasetyo, H. (2025))

Perkembangan pariwisata saat ini jelas diarahkan pada keberlanjutan, dengan fokus pada penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara bijaksana dan jangka panjang.

Perkembangan pariwisata harus mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan, mengutamakan penggunaan sumber daya alam dan manusia secara bijaksana. Pemberdayaan sektor swasta dalam kontribusi terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan menjadi krusial, sesuai dengan aspirasi pemerintah untuk menjadikan pariwisata sebagai ciri khas di berbagai wilayah. Pencapaian destinasi pariwisata yang kuat memerlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan menciptakan citra positif. Faktor-faktor penting seperti infrastruktur transportasi yang baik, penyediaan akomodasi, dan revitalisasi daya tarik wisata menjadi elemen kunci dalam kelancaran pembangunan pariwisata. Pentingnya upaya bersama untuk memelihara dan meningkatkan lingkungan sekitar sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan juga ditekankan. Peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi menjadi krusial dalam mencapai pariwisata yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, fokus pengembangan pariwisata juga diarahkan pada ambisi menarik wisatawan, baik domestik maupun asing, dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan harus melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan ambisius ini. (Saputra, I. P. D. A. (2024).)

Pengembangan destinasi pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya. Prinsip perancangan kawasan alam merupakan dasar-dasar penataan kawasan memasukan aspek yang perlu dipertimbangkan dan komponen penataan kawasan tersebut. Gunn and Var, (2002) mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil secara optimal didasarkan pada empat aspek yaitu :1) Mempertahankan kelestarian lingkungannya, 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut, 3) Menjamin kepuasan pengunjung, 4) Meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangan.

(Suardana, I. W. (2013).)

1. Pengertian Pengembangan

Pengmbangan merupakan pembangunan secara bertahap dan teratur serta menjurus ke sasaran yang dikehendaki, Pengembangan bertujuan untuk mengembangkan produk dan

pelayanan yang berkualitas, seimbang, dan bertahap atau suatu proses atau suatu cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna maupun berguna. Dengan kata lain, pengembangan berarti pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus sampai mendapatkan hasil yang diharapkan. Jika di tinjau dari kepariwisataan, pengembangan merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi. Pengembanaan pariwisata tidak terlepas dari arah pengembangan kebudayaan Nasional Indonesia, dalam keadaan nasional itulah terletak landasan bagi kebijakan pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan ekonomi lokal, pengembangan merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. (Siregar, M. D. (2024).

2. Teori Community Based Tourism

Konsep CBT muncul pertama kali sekitar tahun 1970-an akibat adanya kritikan atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh mass tourism. Kemudian mendapatkan perhatian lebih pada tahun 2000, dimana Bank Dunia (World Bank) mulai memikirkan bagaimana caranya menanggulangi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata yang kemudian dikenal dengan "community-based

tourism” (CBT). Selanjutnya diidentifikasi adanya tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni adventure travel, cultural travel, dan ecotourism. Dibahas pula kaitannya dengan akomodasi yang dimiliki oleh masyarakat atau disebut small family-owned hotels yang biasanya berkaitan erat dengan tiga jenis kegiatan tersebut. Bank Dunia yakin bahwa peningkatan wisata adventure, ecology dan budaya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan sekitarnya sekaligus memelihara budaya, kesenian, dan cara hidup masyarakat di sekitarnya.

CBT melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan, sehingga dengan demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata. Jadi sesungguhnya CBT adalah konsep ekonomi kerakyatan di sektor riil, yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya pun langsung dinikmati oleh mereka.

(Wijaya, N. S., & Sudarmawan, I. W. E. (2019))

Dalam buku pegangan yang diterbitkan REST (1997), dimuat hal-hal konseptual dan praktis dari CBT. Menurut REST, secara terminologis, pelibatan partisipasi masyarakat dalam proyek pengembangan pariwisata mempunyai banyak nama, yakni Community-Based Tourism (CBT), Community-Based Ecotourism (CBET), Agrotourism, Eco and Adventure Tourism dan homestay. Di kalangan akademik, belum ada konsensus terhadap istilah-istilah dari beragam tipe pariwisata ini. Adapun definisi CBT adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (local way of life). Dengan demikian, CBT sangat berbeda dengan pariwisata massa (mass tourism).

CBT merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal (Pinel: 277). CBT bukanlah bisnis wisata yang bertujuan untuk memaksimalkan profil bagi para investor. CBT lebih terkait dengan dampak pariwisata bagi masyarakat dan

sumber daya lingkungan (environmental resources).

CBT lahir dari strategi pengembangan masyarakat dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat rural/lokal. Dalam khasanah ilmu kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan istilah community based tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Konstruksi CBT ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (growth oriented model) yang seringkali mendapatkan banyak kritik telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi. Kritik tersebut muncul karena di tingkat global, aktivitas wisata secara massif yang berjalan selama ini dipercaya memunculkan dampak negatif, ditandai dengan berlangsungnya penurunan kualitas lingkungan yang sering dijamah wisatawan. (idtesis.com. (2021, Mei 11).)

3.

DAFTAR PUSTKA

- Saragih, M. G., & SE, M. (2022). Pengembangan pariwisata berkelanjutan. CV. Tungga Esti.
- Yunus, J. A. Y. W. (2003). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK SADAR WISATA UNTUK MENINGKATKAN PARIWISATA DI DESA WISATA METUN SAJAU KABUPATEN BULUNGAN (Doctoral dissertation, IPDN).
- Budiani, S. R., Wahdaningrum, W., Yosky, D., Kensari, E., Pratama, H. S., Mulandari, H., Iskandar, H. T. N., Alphabettika, M., Maharani, N., Febriani, R. F., & Kusmiati, Y. (2018). Analisis potensi dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah. Jurnal Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI).
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pengembangan Desa Wisata. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan. (2023). Kabupaten Bulungan dalam Angka. Tanjung Selor: BPS Kabupaten Bulungan.
- Pemerintah Kabupaten Bulungan. (2022). Profil dan Potensi Pariwisata Kabupaten Bulungan. Tanjung Selor: Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan.
- Darmatasia, F., Irawan, B., & Apriani, F. (2020). Upaya pengembangan pariwisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *eJournal Administrasi Publik*, 8(1), 8707–8718. ISSN 2541-674X.
- Kurniawati, R., & MM, M. (2013). Modul pariwisata berkelanjutan. Curugbajing: Petungkriyono, 1, 1-71.
- Irawati, N., & Prasetyo, H. (2025). BUKU PARIWISATA BERKELANJUTAN Konsep, Penerapan, dan Tantangan. Penerbit Widina.
- Saputra, I. P. D. A. (2024). Pentingnya Pariwisata Berkelanjutan dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 4(02), 207-217.
- Suardana, I. W. (2013). Analisis kebijakan pengembangan pariwisata. In Seminar Nasional: Unud.
- Wijaya, N. S., & Sudarmawan, I. W. E. (2019). Community Based tourism (CBT) sebagai strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di DTW Ceking Desa Pekraman Tegallalang. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(1), 77-98.
- Siregar, M. D. (2024). Analisis pengembangan objek wisata Pantai Indah Sebintang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- idtesis.com. (2021, Mei 11). Teori lengkap tentang implementasi Community Based Tourism menurut teori dan pendapat ahli dan contoh tesis tentang implementasi Community Based Tourism. Diakses dari <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-implementasi-community-based-tourism-menurut-teori-dan-pendapat-ahli-dan-contoh-tesis-tentang-implementasi-community-based-tourism/>